

UPAYA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA MELALUI PROSES PERBERDAYAAN (STUDI KASUS DI KEL. NGAGLIK KOTA BATU)

Karyanto¹⁾, Adyla Mita Lestari²⁾

¹Fakultas Pertanian Universitas Wisnuwardhana Malang

Email: dyla.mita@gmail.com

Abstract

Many empowerment programs implemented to the community have not been able to reduce or reduce poverty in Indonesia in general. The failure of empowerment is often also colored or caused by inadequate capacity of actors, including in terms of structuring participation as an instrument and process in empowerment. Departing from this thought, researchers are interested in exploring the implementation process in Ngaglik Village. This research was conducted using qualitative research. The results of the research in the field indicate that empowerment in the Ngaglik Village area involves actors in a number and complex manner. The government as a bureaucratic organization with very legal conditions is no longer the only dominant actor, but has various roles with other empowerment institutions. The actor or process of transferring power and authority is also an integral part of the empowerment process itself. Other important actors in empowerment are Kelurahan (LPMK) which in addition to being a Community Empowerment Institution. Community empowerment in Ngaglik Village as a whole has been running or has been implemented properly, some of which have resulted in positive real impacts for the community, such as the revolving of funds for productive economic activities. Empowerment programs based on their formulation and implementation initiatives can be divided into centralized empowerment programs (nationally based) and empowerment programs based on local initiatives. Even though it has produced several positive outputs and outcomes, the implementation of the empowerment program still requires efforts to reform and improve. This is inseparable from the fact that shows that the implementation of the program still faces many obstacles, both related to the conception and behavior of the target group (community).

Keywords: *community development, actors*

1. PENDAHULUAN

Banyak program pemberdayaan tidak memiliki konsep yang matang bahkan terdapat diantaranya konsep yang bergeser dari makna pemberdayaan yang sebenarnya. Pemberdayaan bukanlah alat justifikasi pemerintah untuk menggeser beban kepada masyarakat. Pemberdayaan bukan persoalan yang sederhana, selain terkait dengan persoalan konsep juga menuntut berbagai persyaratan dari berbagai factor baik yang berindak selaku pemberdaya maupun pihak yang diberdayakan. Sinergitas dari kolaborasi diantara keduanya menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan. Pemberdayaan juga bersentuhan dengan komitmen dari para pelaku atau aktor pemberdayaan, dimana aktor pemberdayaan ini tidak pernah dalam keadaan tunggal. Kegagalan pemberdayaan seringkali juga diwarnai atau disebabkan oleh

kapasitas aktor yang tidak memadai. Termasuk juga dalam konteks ini adalah bagaimana masing-masing aktor pemberdayaan menjalankan tugas dan mengkoordinasikan kegiatannya dengan aktor yang lain. Administrasi dan koordinasi yang rapi akan menjadi salah satu kunci keberhasilan suatu program pemberdayaan. Pemberdayaan juga membutuhkan instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan. Salah satunya yang paling penting adalah mekanisme partisipasi masyarakat. Instrumen ini juga harus terstruktur secara integral sebagai bagian dari proses pemberdayaan. Oleh karena itu pertanyaan yang mengemuka adalah mengenai terintegrasinya mekanisme partisipasi masyarakat dalam implementasi program pemberdayaan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut maka menjadi dorongan

tersendiri bagi peneliti untuk melakukan kajian tersebut.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Siapa saja aktor (*Stakeholders*) yang terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan bagaimana hubungan di antara aktor-aktor tersebut?
- 2) Bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat ?
- 3) Apakah partisipasi masyarakat dapat menjadi sarana bag pemberdayaan yang sesungguhnya?

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menggambarkan pihak-pihak yang berkepentingan sekaligus bertanggungjawab terhadap proses pemberdayaan masyarakat dan hubungan di antara aktor yang ada.
- 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis wujud konkrit dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- 3) Untuk mengetahui dan menggambarkan proses partisipasi masyarakat yang tercipta sekaligus kontribusinya terhadap tujuan pemberdayaan.

2. LANDASAN TEORI

Konsep dan Paradigma Pembangunan

Pembangunan kerap kali dipahami sebagai serangkaian upaya untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui Langkah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dukungan stabilitas politik yang mantap sehingga kemudian memunculkan asumsi bahwa: (1) seolah-olah pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan akan membawa kebaikan hidup bagi masyarakat secara keseluruhan (2) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti roda produksi telah membuka lapangan kerja dan menggairahkan pasar sehingga dapat menjawab kebutuhan masyarakat (3) dinamika politik merupakan hambatan bagi pertumbuhan ekonomi akibat terlalu sibuknya masyarakat untuk urusan-urusan politik yang tentu saja rawan terjadinya konflik (4) realitas kebudayaan masyarakat terutama masyarakat tradisional dipandang sebagai kendala kemajuan sehingga ekonomi dapat dan harus merubah kebudayaan lama dan menggantikannya dengan kebudayaan baru yang modern (Juliantara, 2010).

Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan

Pemberdayaan adalah membenahi kapasitas masyarakat untuk memberdayakan diri mereka sendiri dengan terlebih dahulu memberikan kekuasaan kepada mereka, para pengertian ini maka pemberdayaan pada tahap awal menyangkut aspek kekuasaan yang juga harus terdistribusikan dan dimiliki oleh masyarakat. Dimensi pemberdayaan dengan demikian juga dipengaruhi tatanan sosial politik mengenai distribusi kekuasaan. Pada kondisi masyarakat yang disinyalir tidak berdaya merefleksikan keterbatasan atau bahkan tidak adanya sama sekali kekuasaan yang dimiliki oleh masyarakat. Pada bagian lain, (Paul dalam Pranarka dan Moeijarto, 2016)

Dimensi -dimensi pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan tindakan intervensi untuk mengurangi dan menghilangkan sumber ketidakberdayaan masyarakat. Sementara bentuk dan sumber ketidakberdayaan tersebut muncul dengan berbagai macam wajah atau dimensi sehingga pemberdayaan yang dilakukan juga harus merupakar. aksi yang bersifat multidimensi. Cartzon mengemukakan *bahwa the purpose of empowerment is to free someone from rigours control by instruction and orders and give the freedom to take responsibility for their on ideas and actions, to release hidden resources which would otherwise remain inaccessible* (dalam Kempton, 1995) dengan mengacu pada pendapat ini, maka pemberdayaan bertujuan untuk membebaskan seseorang dari kendali kaku atas instruksi dan perintah, dan kemudian memberikan kebebasan kepada mereka untuk bertanggung jawab atas ide-ide dan tindakannya sebagai potensi.

Pemberdayaan sebagai sebuah paradigma pembangunan

Paradigma baru dalam pembangunan memandang bahwa masyarakat miskin memiliki potensi-potensi untuk berkembang. Pembangunan harus dilakukan dengan cara memberikan kesempatan pada kelompok orang miskin (*grass root*) untuk merencanakan dan melaksanakan program yang mereka pilih sendiri. Paradigma baru dikenal sebagai pemberdayaan (*empowerment*). Model baru dalam

pendekatan pembangunan disebut "Pendekatan pembangunan berwawasan kerakyatan" (*people centered development*) atau "pembangunan dari dalam" (*development from within*). Artinya melalui perencanaan, adalah memberdayakan setiap anggota tim untuk melaksanakandan mengelola kinerja unitnya melalui perencanaan, pengendalian, pengkoordinasian ataupun penyempurnaan pekerjaan. Untuk memberdayakan masyarakat dipedesaan, Islamy (2018).

Partisipasi masyarakat sebagai saran pemberdayaan

Penanggulangan kemiskinan yang bertumpu pada peran serta aktif dan produktif dari masyarakat diupayakan untuk menumbuhkembangkan kemandirian dankemampuan penduduk miskin agar tidak lagi terus bergantung padapihak lain. Itulah sebabnya kemandirian merupakan suatu strategi pembangunan dan antitesis dari paradigma ketergantungan (Hetne, 2011).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan melalui proses partisipasi masyarakat. Salah satu karakter dari penelitian ini adalah lebih mementingkan proses penelitian daripada hasil penelitian. Oleh sebab itu, bukan kebenaran mutlak yang dicari melainkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu.

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah:

- 1) Identifikasi aktor-aktor yang bertanggung jawab dan terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- 2) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- 3) Proses pelibatan masyarakat atau partisipasi dalam pembangunan.

Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian in ditentukan secara sengaja, yaitu Kelurahan Ngaglik Kecamatan Batu Kota Batu berdasarkan pertimbangan- pertimbangan, bahwa di Kelurahan Ngaglik Kotatif Batu saat ini sedang bergulir beberapa program

pemberdayaan masyarakat schingga menarik untuk dikaji.

Sumber Dan Jenis Data

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan dan juga observasi lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen/catatan- catatan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mengumpulkan data dengan menggunakan 3 (tiga) cara yaitu:

- 1) Wawancara (indepth interview)
- 2) Observasi
- 3) Dokumentasi

Peneliti terjun langsung dilapangan, dilakukan pada para pelaksana/implementor dan kelompok sasaran dari program pemberdayaan yang ada. Observasi dilakukan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang berbasis pemberdayaan, upaya program-program peningkatan partisipasi masyarakat, mekanisme Forum Musyawarah Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Batu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Ngaglik. Kelurahan Ngaglik termasuk salah satu Batu dengan luas wilayah 3,633 Km². Secara administratif terbagi dalam 15 (Lima belas) Rukun Warga dengan 77 (Tujuh puluh tujuh) Rukun Tetangga.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, setiap tahunnya kepala kelurahan mempertanggung jawabkan segala kegiatan, baik berupa pembuatan laporan semester, maupun pertanggung jawaban keuangan, terutama yang berasal dari dana bantuan Pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban disesuaikan dengan petunjuk dan bimbingan dari Instansi pemberi bantuan Pertanggung jawaban Kepala Kelurahan meliputi kegiatan pertanggungjawaban pemerintah dan pertanggung jawaban pembangunan kelurahan.

Aktor-aktor Pemberdayaan di Kelurahan Ngaglik, Kec. Batu, Kota Batu

Pemerintah dominan pada satu sisi, diharapkan tidak mengabaikan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu kunci

keberhasilan pembangunan. Pemerintah tidak bisa lagi bersikap seolah-olah mengetahui dan mampu menjalankan pembangunan secara tunggal, karena sesungguhnya masyarakat jauh lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan.

Pembangunan harus bermuatan pemberdayaan utamanya pada masyarakat. Pembangunan membutuhkan keterlibatan banyak aktor (*multiactors*) pembangunan. kapasitas aktor-aktor pembangunan juga merupakan hal yang harus dijadikan adanya tindakan intervensi yang jelas dan tepat untuk menyiapkan kondisi masyarakat untuk mengambil peran. Terlebih dahulu pemahaman akan diarahkan pada persepsi aktor dan pelaku pemberdayaan itu sendiri, sifat hubungan antar melingkupinya. Program pemberdayaan dijalankan sebagai bagian yang integral menjadi salah satu fokus perhatian utama dari Pemerintah Kelurahan dalam mengakomodasi agenda pemberdayaan ke dalam struktur atau susunan Kelurahan Ngaglik, salah satu seksi yang dibentuk adalah seksi pemberdayaan masyarakat.

Aktor pemberdayaan dapat berupa lembaga atau organisasi, atau tokoh-tokoh masyarakat. *grassroot organisation*. Tidak semua aktor terlibat dalam satu jenis yang sama.

- 1) PDMDKE (Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi). Aktor yang terlibat adalah LKMD, Lurah, Tokoh UP2KS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera).
- 2) Dana Pendidikan. Aktor yang terlibat adalah Lurah, RT/RW, Pendidikan Institusi Masyarakat. Aktor yang terlibat adalah Lurah, RT/RW, PKK, Pemerintah, Dinkes, dan Puskesmas.
- 3) Pertimbangan untuk pelibatan aktor dalam suatu program pemberdayaan. "top down" yang rigid tidak memungkinkan dilakukan penyesuaian dengan kondisi lokal, maka semuanya harus mengikuti kebijakan yang telah ada.
- 4) Bidang Kesehatan Pengadaan Fasilitas Kesehatan Lurah, RT/RW, PKK, Pemerintah, Dinkes, Puskesmas. pemberdayaan akan atau keterkaitan dimplementasikan.

Jika keberadaan lembaga tersebut memang erat hubungannya dengan tidak ada

hubungannya tidak dilihat secara langsung meskipun demikian, pendapat di atas menunjukkan bahwa keterkaitan dari hubungan keberadaan lembaga lokal dengan jenis dan tujuan program menjadi salah satu, terkecuali jika untuk hal ini diberlakukan aturan dimainkan para aktor dan sifat serta digambarkan secara umum dan singkat mengenai beberapa aktor pemberdayaan yang telah disebutkan oleh informan. Tentunya terlibat dalam frekuensi dan intensitas yang dipandang tinggi.

Banyaknya kelompok aktor dan beragamnya jenis pemberdayaan pada dasarnya memiliki dua sisi implikasi bagi pemberdayaan masyarakat. Pertama menjalankan komitmen pemberdayaan dengan baik mampu menjalin "*Empowerment network*" atau jaringan pemberdayaan dimana antara satu program dengan program yang lain bersifat saling mendukung, saling mengisi dan antara satu aktor dengan aktor yang lain terjalin interaksi, komunikasi koordinatif sehingga menghindarkan dari terjadinya pertentangan dan tumpang tindih kepentingan.

Sifat dari mekanisme kerja yang dijalankan oleh aktor "programme prosedural sesuai dengan petunjuk dan ketentuan-ketentuan program. adalah implikasi nositif yakni ketika berbagai aktor tersebut terjadinya tumpang tindih kegiatan pemberdayaan yang selain dapat berujung pada kegagalan program pemberdayaan, juga dapat menyebabkan untuk memahami bagaimana masing-masing aktor tersebut bertindak, berperan dan berinteraksi satu sama lainnya atau bagaimana hubungan dari berbagai aktor yang ada pada dasarnya bisa membedakan peran pemerintah kelurahan ini pemberdayaan yang berasal dari kebijakan nasional atau pemerintah pusat dan pemberdayaan yang bersifat nasional. Pada umumnya atau biasanya pemerintah kelurahan hanya bersifat koordinatif, fasilitatif ataupun telah dirumuskan. Intinya pemerintah kelurahan bukan pelaksana, pelaku kebijakan itu sendiri sudah ada pemberdayaan masyarakat. Dua kemungkinan bisa terjadi dan bersifat konstruktif. Kemungkinan pertama yakni ketika proses interaksi dan mekanisme tindakan tetap berada dalam konstruktif. Kemungkinan ini bisa terwujud apabila berbagai kelompok aktor yang ada mementingkan tercapainya konsensus melalui mekanisme yang kompromistis utamanya dari pihak pemerintah kelurahan

yang memiliki basis kepentingan internal kelompoknya yang kelembagaan aktor hanya menjadi ajang/arena dominasi atau pihak terhadap pihak yang lain, Kemungkinan kedua, yakni apabila aktor-aktor pemberdayaan berinteraksi dengan mengalahkan kepentingan masyarakat dan dikonstruksikan secara otoritatif bahkan cenderung koreksif. Implikasi yang muncul kemudian, interaksi kepentingan masyarakat. interaksi antar aktor.

Di Kelurahan Ngaglik adalah kemungkinan yang pertama, aktor pemberdayaan berada dalam konteks pada harus diakui tidak. semua aktor dapat menjalankan perannya dengan baik. Selanjutnya, dari hasil pengamatan peneliti selama berada di lokasi penelitian juga ditemukan bahwa kesadaran individu - individu anggota institusi lokal yang akhirnya membentuk kesadaran individu-individu anggota institusi local yang akhirnya membentuk kesadaran kelompok untuk cara yang digunakan oleh mufakat yang dijadikan dasarbagi LPMK dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut institusi dan anggotanya sebagaimana hasil penelitian dilapangan sangat besar Penghargaan terhadap keinginan dan insiatif setiap anggota institusi lokal inilah yang sebenarnya merupakan perekat sosialnya dalam melakukan pemberdayaan.

Pemerintah Kelurahan Ngaglik khususnya seksi pemberdayaan masyarakat, Proses perumusan program pemberdayaan yang berasal lokal kelurahan pada dasarnya sedapat mungkin mengakomodir keterlibatan masyarakat, peran LPMK sangatlah penting. Sebelumnya, LPMK merupakan lembaga pengganti LKMD yang memainkan peran menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk program nyata. Peran ini dijalankan dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah Kelurahan.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut: (1) Pemberdayaan dilingkup dalam jumlah dan kondisi yang sangat kompleks. Pemerintah sebagai organisasi birokratik legal tidak menjadi satu-satunya aktor dominan lainnya. Proses peralihan kekuasaan dan kewenangan juga menjadi bagian inegral dari proses pemberdayaan itu sendiri. Kelurahan (LPMK) selain menjadi mitra pemerintah juga

merupakan wadah aspirasi masyarakat sekaligus penggerak keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan. Institusi lain yang lebih bersifat teknis-operasional juga menjadi aktor penting dalam pemberdayaan seperti PKK, BKM, dan KSM, (2) Pemberdayaan masyarakat Di Kelurahan Ngaglik Kota Batu secara keseluruhan sudah berjalan atau dapat terlaksana berdasarkan pada data dan temuan dilapangan, dan (3) Kelurahan Ngaglik Kota Batu melibatkan aktor tetapi sudah berbagi peran dengan aktor atau institusi pemberdayaan Aktor-aktor penting lainnya dalam pemberdayaan adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat baik bahkan beberapa diantaranya sudah menghasilkan dampak nyata yang positif bagi masyarakat, seperti misalnya, pengguliran dana untuk kegiatan.

6. REFERENSI

- Abdul Wahab, Solichin. 2012 *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Aditya Media. Faisal, Sanapiah. 2009. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta Grafindo Persada.
- Bintoro, Tjokroamidjoyo. 2016. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.
- Bodgan, and Biklen. SK. 2012 *Introduction To Qualitative Research*. Foris Publication. New York.
- Bryant and White. 2009 *Management Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta. LP3ES
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia. Pustaka Tama.
- Chambess, Robert. 2008. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Diterjemahkan Oleh Pepep Sudrajat. Jakarta. LP3ES.
- Conyers, Diana. 2014. *Perencanaan Sosial Di Dunia Keiga Suatu Pengantar*, Diterjemankan Oleh Susetiawan.

- Yogyakarta :Gajah Mada University Press.
- Dewanta, Setya Awan. 2015. *Kemiskinan Dan Kesenjangan Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Fakih, Mansour. 2019. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Goldberg, Benny. 2006. *"Come The Devolution", The America Prospect*. Winter
- Hagul, Peter. 2015. *Teori Pembangunan Dan Tiga Dunia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Islamy, M Irfan. 2018. *Dari Pembangunan Ke Transformasi Jalan Pembaruan Desa*. dalam Dadang Juliantara (Ed). 2019. Menggeser Pembangunan Memperkuat Rakyat Emansipasi Dan Demokrasi Molai Dari Desa. Yogyakarta: Lapera Pustaka Tama.
- Korten. David dan Sjahrir, 2018. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Milhacl (2002) *Analisis Data Kualitatif* . Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohidi. Jakarta.: UI - Press